

Membangun Kerangka Keilmuan (Ekonomi-Akuntansi) sebuah Bingkai Nilai-nilai *Emansipatoris*

Building a Scientific Framework (Economics-Accounting): An Emancipatory Values Frame

Afifudin

ABSTRACT

This article discusses Economics-Accounting from the perspective of "Prophetic Social Sciences", especially on emancipatory values. We all realize that the current economic-accounting science is very radical, materialistic, mechanical, and even ignores the fundamental values of human beings as servants of Allah SWT. This concept is not an exaggeration if we look at the material that is the basis of ontology, its main epistemology. On this basis, an alternative scientific (economic) development in the future is needed that is more rooted in human nature. With the "Prophetic Social Sciences: emancipatory" approach, this article tries to unravel and describe the transformation of Islamic values in the basic philosophy of science (economics). The concept of the transformation of Islamic social values is rooted in the Al-Qur'an letter Ali Imran verse 110. From the discussion carried out, that the concept of economic-accounting scientific development carried out should prioritize prophetic social science on emancipatory values should reflect on critical values and justice.

Keywords: Positivism, Transformative, Emancipatory, Critical and Justice

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan keilmuan Ekonomi-Akuntansi dalam perspektif "Ilmu Sosial Profetik" khususnya pada nilai *emansipatoris*. Kita semua menyadari, bahwa ilmu ekonomi-akuntansi yang ada sekarang ini sangat radikal, materialistis, mekanik, bahkan mengabaikan nilai-nilai fundamental manusia sebagai hamba Allah SWT. Konsep ini tidak berlebihan, kalau kita lihat materi yang dijadikan dasar *ontology*, *epistemology* utamanya. Dengan dasar inilah diperlukan alternatif pengembangan keilmuan (ekonomi) ke depan yang lebih mengakar pada fitrah manusia. Dengan pendekatan "Ilmu Sosial Profetik: *emansipatoris*", artikel ini mencoba mengurai dan menggambarkan transformasi nilai-nilai ke-Islaman dalam filosofi dasar keilmuan (ekonomi). Konsep transformasi nilai sosial ke-Islaman berakar pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Dari diskusi yang dilakukan, bahwa konsep pengembangan keilmuan ekonomi-akuntansi yang dilakukan hendaknya mengedepankan ilmu sosial profetik pada nilai *Emansipatoris* hendaknya mencerminkan pada nilai-nilai *critical* dan *justice*.

Kata Kunci: Positivism, Transformatif, *Emansipatoris*, Critical and Justice



JIHBIZ
Jurnal Ekonomi,
Keuangan dan
Perbankan Syariah
P-ISSN 1238-1235

Vol. 2 No. 1 2018
Page 19-30

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat Malang,
Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v2i1.764>



Author(s):

Afifudin

Departemen Ekonomi Universitas Islam
Malang, Indonesia
Email: afifudin26@gmail.com

Correspondence:

afifudin26@gmail.com

Article Type:

Conceptual paper

1. Pendahuluan

Pada prinsipnya tidak ada observasi yang netral, semua pengalaman konseptual kita selalu dibentuk oleh kerangka konseptual yang kita gunakan (Adian, 2002: 82). Sesungguhnya tuntutan bebas nilai itu sendiri tidak mutlak karena tuntutan agar ilmu pengetahuan bebas nilai dari nilai tertentu, hanya berlaku bagi nilai lain di luar nilai yang menjadi taruhan utama ilmu pengetahuan (Keraf dan Dua 2001, 150).

Pandangan yang demikian menurut Heriyanto (2003, 2-3) diilhami oleh pandangan dunia (*world-view*) mekanistik-linier Cartesian dan Newtonia (baca *positivism, modern*). Bisa dikatakan bahwa, pandangan *potivism* menganggap adanya keberadaan dunia (ilmu pengetahuan) bersifat obyektif dan bebas nilai.

Narasi tersebut menggambarkan betapa tidak berdayanya manusia dalam memaknai arti kehidupan. Setiabudi dan Triuwono (2002, 2) mengkritisi hal ini dengan menggambarkan sebagai ketidakberdayaan manusia dalam memaknai kehidupan yang diakibatkan oleh pola lintasan kehidupan yang telah tersusun begitu mekanik dan linier tetapi menantang. Dengan sangat jelas, orientasi ke depan yang ingin dicapai hanya bermuara pada kehidupan materi belaka.

Mengkritisi ketidakberdayaan manusia sebagaimana diutarakan di atas, Sulaiman (1997, 6-7) berpendapat bahwa posisi superior yang dicapai barat dalam bidang ilmu pengetahuan (di dalamnya ekonomi-akuntansi) dan pemikiran murni hasil intelektual manusia yang tidak ada urusan sama sekali dengan wahyu Illahi. Permasalahan yang muncul adalah, ketidakmampuan menolak penyesuaian diri dan ketidakseimbangan, hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya metode empiris untuk menyelesaikan konflik antara kesejahteraan masyarakat pada satu sisi dengan keinginan dan kepentingan diri pribadi pada sisi yang lain. Hal ini terjadi akibat keterbatasan pemahaman manusia akan kehidupan manusia di akhirat nanti.

Tidak ada keraguan bahwa apabila manusia ingin mengikuti prinsip yang pasti dalam kehidupan yang berwatak religius atau bukan ia harus mengambil pendekatan yang terdefinisi dengan baik. Dengan demikian, seseorang harus mengelakkan keterlibatan-keterlibatan yang mungkin sesuai dengan hasratnya (kepentingan) yang sesaat tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hidupnya. Dari pengendalian dan pendisiplinan diri adalah hakiki yang penting dalam kehidupan setiap orang yang hendak menjalani kehidupan manusia yang rasional (Lari 2001, 3-4).

Dalam konteks ini Gambling dan Karim (1991) menjelaskan, bahwa dari sistem nilai Islam akan lahir sistem ekonomi Islami dan sistem akuntansi Islami. Harahap (2003b, 65) memberikan pemahaman, bahwa Islam merupakan sistem nilai terpadu yang berasal dari Allah SWT. yang mutlak benar dan didesain sebagai suatu sistem terpadu bukan saja khusus bidang tertentu (ekonomi, sosial, politik) akan tetapi juga dia lengkap terintegrasi dengan kebutuhan dunia akhirat.

Guna memberikan gambaran dan pemahaman yang dimaksud sebagaimana di atas, maka ke depan akan dilakukan kajian keilmuan ekonomi dalam bingkai *emansipatoris*. Hal ini menjadi penting untuk kita diskusikan, sebab nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadist yang ditransformasikan dalam ilmu sosial profetik untuk seyogyanya dilakukan pembumian pada setiap aktivitas kehidupan, demikian halnya ilmu ekonomi-akuntansi. Hal ini dilakukan untuk menjawab

transformasi keilmuan modern yang banyak dipersoalkan, sebagai akibat tidak sesuainya antara tuntutan perkembangan zaman dengan cara pandang manusia.

2. *Emansipatoris*: Kesenjangan yang Melintas Batas

Emansipatoris berasal dari pemahaman emansipasi yang menurut Partanto dan Al-Barry (2001, 145) diartikan sebagai sebuah pembebasan diri dari perbudakan: yaitu gerakan untuk memperoleh pengakuan persamaan kedudukan, derajat serta hak dan kewajiban dalam hukum; dalam pengakuan kesamaan hak, derajat dan kedudukan. Tentunya pembebasan dalam konteks sekarang ini lebih pas kalau dilihat sebagai pembebasan (nabi mungkar) terhadap struktur sosial yang eksploitatif menuju pembebasan penindasan (Pribadi dan Haryono 2002, 338).

Pencerahan (pembebasan dan perubahan) menurut Kant (1724) dalam Sahal (1994) diartikan sebagai pembebasan “diri” dari situasi yang tidak manusiawi. Lebih jauh, Sahal (1994, 13) dalam konteks ini menjelaskan bahwa:

...“jalan keluar” yang membebaskan manusia dari situasi ketidakdewasaan, yakni situasi manusia yang masih menggantungkan dirinya pada otoritas di luar dirinya, yang dengannya ia sendiri merasa bersalah, entah otoritas itu atas nama tradisi, dogma agama, ataupun negara.

Sejalan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 3) menjelaskan, bahwa perubahan-perubahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Yaitu pembebasan diri dari ikatan-ikatan semu yang tidak perlu diikuti, pembebasan dari kekuasaan semu (materi), dan pembebasan dari ideologi semu (kapitalisme). Dengan demikian nantinya diharapkan dari pembebasan ini, terjadi perubahan pikiran dan tindakan manusia menuju pemikiran yang luas, holistik, dan mencerahkan.

Kesadaran diri tentang hakikat manusia juga merupakan dasar yang memberikan nilai *emansipatoris* pada pembentukan dan pengembangan keilmuan, di dalamnya ekonomi dan akuntansi (Triyuwono 2002b, 3). Artinya, pembentukan dan pengembangan keilmuan tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atas pihak yang lain. Dalam konteks ini, kesetaraan (kesamaan) lebih ditekankan pada keseimbangan nilai-nilai yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, atau dengan kata lain sebagai nilai kodrati hakiki yang dimilikinya. Pembentukan dan pengembangan keilmuan (akuntansi dan ekonomi) hendaknya meletakkan dasar pemikiran pada “kesetaraan” yang melintas batas tanpa menghilangkan nilai ilmiahnya.

Akibat adanya distorsi salah satu nilai yang dimiliki manusia (bahkan mengabaikannya) menggiring kita pada orientasi semu (materi, ekonomi) yang akan kita harapkan. Sejalan dengan hal ini Hegel dalam Sahal (1994, 13) menggambarkan, bahwa krisis yang tergambar dalam ilmu modern merupakan sebuah krisis yang tidak hanya gerak dialektika yang mengawang-awang di dalam ide. Bahwa kedudukan nilai filosofi “*emansipatoris*” dalam pembentukan keilmuan (akuntansi dan ekonomi) menjadi sangat relevan. Hal ini tidak berlebihan, sebab akuntansi dan ekonomi merupakan derivasi dari ilmu sosial yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai *emansipatoris*.

Untuk menghantarkan nilai filosofi “*emansipatoris*” dalam teori keilmuan, maka dibutuhkan derivasi konsep dasar yang tepat. Sejalan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 6) menurunkan prinsip filosofi *emansipatoris* dalam konsep dasar yang terbagi dalam dua bentuk. Pertama critical, Sawarjuwono (2002, 1) menjelaskan pemahaman nilai dasar critical dalam bingkai study yang diturunkan dari pemikiran Habermas bahwa:

Critical Study adalah suatu studi yang mempunyai tujuan ganda yaitu: pertama, memahami praktik akuntansi dan manajemen di mana kedua cabang ilmu pengetahuan itu diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan dalam mempraktikkan kedua disiplin tersebut. Tujuan kedua yaitu menemukan pengetahuan “baru” yang relevan dengan dan yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmunya.

Dalam konteks ini, Salim dalam bukunya “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzim dan Penerapannya) menjelaskan:

Mentakrifkan ilmu sosial (akuntansi-ekonomi) sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap “the real structure” dibalik ilusi, false needs, yang ditampilkan dunia materi, dengan tujuan membentuk kesadaran sosial agar memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan mereka (2001, 42 dan dalam kurung penekanan penulis).

Konsep dasar kritis dalam konteks pengembangan dan pembentukan teori (keilmuan) akuntansi dan ekonomi berfungsi sebagai pembentuk watak yang terbuka. Keterbukaan yang dikembangkan bukan dalam makna keterbukaan tanpa arah, melainkan keterbukaan untuk menuju pada pembentukan keilmuan yang adaptif, yaitu teori (keilmuan) yang mampu memperhatikan perubahan lingkungan. Berkaitan dengan hal ini Triyuwono (2002b, 6) menjelaskan bahwa:

Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan keilmuan (akuntansi modern). Dan berdasarkan penilaian kritis ini dapat dibangun teori keilmuan (akuntansi) yang lebih dari sebelumnya.

Penilaian kritis dalam melihat teori dan praktik dari akuntansi dan ekonomi juga hendaknya tidak mengabaikan kaca-mata yang akan digunakan. Kalau yang kita gunakan dalam melihat keilmuan menggunakan nilai ideologi Islam, maka kesetaraan yang dimaksud dalam konteks ini kesetaraan yang tergambar dalam nilai-nilai syari’ah. Sebab, dalam pembentukan dan pengembangan teori keilmuan sangat kental dengan nilai ideologi masyarakat. Dengan demikian penentuan nilai ideologi yang tepat akan membawa makna sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini Triyuwono (1996, 58) menjelaskan bahwa:

... jika akuntansi (ilmu sosial) dikonstruksi dengan nilai ideologi lain yang tidak kompatibel dengan nilai “keadilan Ilahi”, maka informasi akuntansi yang direfleksikan dari realitas sosial yang dibangun dengan nilai “keadilan Ilahi” akan berbias dan terdistorsi dengan nilai ideologis yang digunakan untuk mengkonstruksi bangunan akuntansi itu.

Dalam konteks ekonomi syari’ah misalnya, peletakan nilai “Keadilan Ilahi” menjadi sentral utama. Islam dalam hal ini sebagai *rahmatan lil’alamin* (QS. 2, 30). Dengan demikian, konstruksi keilmuan (teori akuntansi dan ekonomi) yang berbasis nilai-nilai syari’ah akan mengacu pada nilai-nilai syari’ah (baik dalam tataran ontologi, epistemologi dan sampai pada aksiologi itu

sendiri). Triyuwono (1996) menjelaskan, bahwa konstruksi keilmuan (akuntansi dan ekonomi) akan sangat di pengaruhi oleh nilai konstruksi ideologi yang digunakan. Hal ini akan sangat berbeda dengan konsep keadilan yang diusung akuntansi konvensional yang meletakkan nilai keadilan sebagai simbol kekuatan pemilik modal (*stockholders*). Dengan sangat jelas, hal ini bisa kita temukan dalam konsep *entity* teori yang digunakan dalam distribusi keuntungan yang diperolehnya.

Gambaran di atas sangat jelas, bahwa konsep dasar kritis sebagai derivasi filosofi *emansipatoris* menekankan pada nilai kritis yang berakar pada nilai ideologi yang digunakan. Keterbukaan yang ditekankan dalam konteks ini adalah keterbukaan (kritis) yang memperhatikan perbaikan dan atau perubahan menuju keilmuan (teori) yang ber-emansipasi secara holistik.

Konsep dasar kedua *justice* (keadilan). Aliran pemahaman keadilan dalam konteks ekonomi (akuntansi) terbagi dalam dua madhab besar yaitu keadilan yang disponsori oleh Aristoteles dan Adam Smith. Kedua madhab ini dalam tataran esensi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama mengusung keadilan dalam bingkai “keadilan komutatif”. Keraf (1996, 111) menjelaskan bahwa “keadilan komutatif” baik yang dikembangkan Aristoteles maupun Adam Smith sama-sama dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara umat manusia. Penekanan “keadilan komutatif” Smith berkaitan dengan pemulihan kerusakan atau kerugian yang telah terjadi dalam sebuah transaksi sosial serta berkaitan dengan pertukaran yang fair dalam sebuah transaksi ekonomi (Keraf 1999, 111).

Keadilan komutatif yang dikembangkan Smith akan sangat kontras kalau dikaitkan dengan keadilan yang bersandar pada etika utilitarianism yang lebih menekankan dan mengedepankan nilai keadilan dalam konteks “untung dan rugi” (baca lebih jauh Chryssides dan Kaler 1995; Yusuf 1997). Teori-teori keilmuan (akuntansi dan ekonomi modern) yang dikembangkan dalam bingkai nilai keadilan *utilitarianism*, maka akan banyak kita temui nilai-nilai maskulin (radikal) yang akan tampak. Konsep pengakuan pendapatan dan biaya yang dijadikan sandaran dalam pengakuan dan pengukurannya masih terjebak pada nilai-nilai materi belaka. Sehingga, dasar penilaian kemajuan perusahaan pun masih menitik beratkan pada nilai-nilai keuangan (ekonomi) dengan mengabaikan stakeholder. Bagaimana kemampuan konsep teori yang dikembangkan ilmu modern dalam menjastifikasi keadilan yang semu (ideologi kapitalisme), menjadi hal yang lumrah untuk kita gunakan. Maka tidak mengherankan, mulai dekade 1980-an khususnya keilmuan akuntansi banyak mendapat kritik pedas dan tajam baik dalam tataran filosofi dan praktik (baca lebih jauh Chua 1986; Preston 1986; Neimark dan Tinker 1986; Triyuwono 1997, 2000; Rasyid 1997).

Kembali pada persoalan “keadilan komutatif” yang di kembangkan Smith sebagaimana di atas, menurut Keraf mengandung tiga keunggulan dibandingkan “keadilan komutatif” yang di kembangkan Aristoteles, sebab keadilan komutatif Smith lebih kooperatif dibandingkan keadilan yang dicanangkan Aristoteles. Hal ini bisa dilihat pada:

... pertama, keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang telah terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Kedua keadilan Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna setiap individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan individual antara manusia yang satu dengan lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik, dan ketiga ...berkaitan dengan hak-hak manusia ... menyangkut

apa yang secara tradisional dikenal melalui teori Aristoteles sebagai keadilan legal atau perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum positif (1996, 112-115).

Keadilan kumulatif yang dikembangkan Smith, kalau dilihat dari dimensi nilai keadilan syariah ada satu kesamaan (dalam tanda petik) walaupun tidak keseluruhan. Dimensi yang patut dicatat dalam keadilan berdimensi syariah adalah adanya dua kekuatan yang disinergikan (materi-non materi). Hal ini bisa dilihat, pada tulisan Khadduri yang memaparkan bahwa:

Akal Budi, ia berpendapat, merupakan suatu instrumen yang dapat mengantarkan manusia untuk memahami kebenaran; akan tetapi untuk agama, ia mengakui bahwa disana terdapat jalan kecil lain, yakni "Wahyu" hal mana para Nabi mampu menyebarkan kebenaran. Karena ia menganggap bahwa kebenaran terakhir itu "Tunggal", baik yang termaktub dalam Wahyu atau diperoleh melalui akal budi, dua jalan kecil ini harus dianggap selaras dan seimbang" (1999, 118).

Lebih jauh menggambarkan bahwa:

... keadilan atas dua tingkat, pertama tingkat Ilahi di mana Akal Budi dan Wahyu tersebut bersesuaian, dan yang lain adalah bentuk keadilan alamiah, produk Akal Budi yang identik dengan Keadilan Rasional (Khadduri 1999, 119).

Konstruksi keilmuan (teori) yang berkeadilan dalam konteks tulisan ini adalah keadilan yang tidak mengabaikan hak-hak manusia, alam dan bahkan melakukan keadilan yang bersinergi. Hal ini bertolak dari pembentukan keilmuan (teori modern) yang lebih menekankan pada salah satu kutub (maskulin, radikal, materi dan rasional) dan meniadakan dimensi lainnya yang dianggap lemah bahkan diabaikan (misal feminin, alam, ilahiyah dan lainnya), dan telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia (baca lebih jauh Triuwono 1997, 2000a; Walters 2003, Smith 2003; Keraf dan Dua 2001; Turner 2003).

Kalau dikaitkan dengan nilai filosofi *emansipatoris* yang diturunkan dalam dua konsep dasar (*critical* dan *justice*), maka pembentukan teori keilmuan di samping bersifat terbuka menuju arah perbaikan juga harus dibarengi dengan keterbukaan yang berkeadilan. Dengan demikian keterbukaan (*critical*) sebagai pembuka untuk menuju perubahan dalam konteks yang lebih baik dengan menekankan pada nilai *justice* (keadilan) dan tidak berdiri di antara kekuatan tertentu. Atau dengan kata lain, pembentukan keilmuan (teori) mengedepankan nilai keseimbangan bersinergi yang berakar dari kesetaraan nilai yang ada (baik bersifat materi non materi, keras lunak, laki-laki perempuan) (baca lebih jauh, Hines 1992; Triuwono 2002a).

Dalam konteks ini misalnya, Triuwono (1996, 58) menggambarkan nilai dasar *justice* yang akan nampak dalam pembentukan ilmu akuntansi hendaknya bersifat kesetaraan (keadilan Ilahi). Lebih jauh dijelaskan bahwa:

Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan (di dalamnya akuntansi itu sendiri) harus menjadikan nilai "keadilan Ilahi" sebagai dasar pijakan dalam berinteraksi dan mengkonstruksi sosial. Ini berarti bahwa akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktik tidak dapat berdiri sendiri; artinya, bahwa akuntansi selalu terikat pada realitas sosial di mana akuntansi tersebut dipraktikkan (Triuwono 1996, 58).

Triyuwono (1996, 58) menggambarkan nilai dasar *justice* yang akan dikembangkan dalam ilmu akuntansi syari'ah hendaknya bersifat kesetaraan (keadilan Ilahi). Dalam pembentukan "keadilan Ilahi" sebagaimana yang dijelaskan Triyuwono akan ditemukan apabila kedua keadilan baik Akal Budi (di dalamnya hukum formal) dan Wahyu disinergikan secara benar (baca lebih jauh Khadduri 1999; Triyuwono 2002).

3. *Justice* dalam Kaidah Ekonomi Islam

Pemahaman keadilan dalam kaidah ekonomi Islam, memberikan dasar pengertian bahwa orientasi ekonomi yang dilakukan tetap dalam bingkai kemakmuran dan kesejahteraan yang tetap mengedepankan akhlak Islam, dalam setiap fase ekonomi, dan adanya distribusi pasar normal. Konsep keadilan ini memberikan gambaran, bahwa keadilan yang akan dicapai tetap dalam kaidah dan nilai-nilai syariah. Larangan riba adalah salah satu contoh konkret, bahwasanya pencapaian keadilan yang digariskan Islam tetap dalam bingkai kaidah-kaidah Islam.

Persoalan keadilan (*justice*) adalah salah satu tema sentral yang ada dalam Al-Quran setelah Allah, ilmu pengetahuan. Gambaran ini memberikan pemahaman bahwa *justice* dalam Islam merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi dan dihormati. Qordhawi (2001, 85) misalnya menyatakan bahwa "ruh" sistem ekonomi Islam adalah keadilan (*justice*). Lebih jauh Qardhawi menjelaskan:

Islam telah mengharamkan setiap hubungan ekonomi yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang diaplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang bai' al-gharar (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi (2001, 85).

Satu persoalan yang patut untuk kita catat adalah, bahwa *justice* dalam ekonomi Islam merupakan satu titik sentral yang diletakkan dalam setiap denyut aktivitas ekonomi yang dilakukan. Demikian halnya dalam perbankan syariah, nilai *justice* harus diletakkan sebagai ruh yang akan menjiwai setiap aktivitas yang ada di dalamnya. Artinya, setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meletakkan nilai *justice* dalam bingkai yang semestinya.

Penjelasan Khadduri, memberikan pemahaman yang mendalam bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak saja bermuara pada satu persoalan rasional yang sering diidentikkan dengan nilai materi, akan tetapi ada satu keadilan yang merentas jauh dan pasti adanya yaitu satu keadilan yang dilandaskan pada nilai-nilai rasional (materi) yang disinergikan dengan kaidah-kaidah Wahyu Ilahiyah (normatif), atau sering kita memahami sebagai keadilan Ilahiyah (dunia-akhirat).

Penerapan konsep *justice* tetap mengacu dua konsep *justice* di atas. Konsep keadilan Ilahiyah dalam tataran riil sebagai ruh dari peletakan konsep ekonomi Islam yang dilandasi nilai etika syariah. Artinya, pemahaman keadilan tidak semata-mata dilandasi pada kemampuan distribusi *profit sharing* semata, akan tetapi jauh memperhatikan kaidah dan norma agama yang bisa kita wujudkan dalam keadilan alam semesta yang diwujudkan dalam keadilan non materi atau *benefit*. Untuk mewujudkan simbol keadilan yang digariskan di atas (Ilahi), maka ada satu distribusi keadilan dalam konteks kekayaan atau materi.

Jadi sangat jelas, *justice* yang diusung dalam pembentukan keilmuan ekonomi-akuntansi adalah keadilan yang bersifat Ilahi, yaitu konsep keadilan yang meletakkan nilai-nilai materi (ekonomi) dan nilai-nilai *normative-intuitive* pada proporsi yang seimbang. Bukan berarti kedua kekuatan ini berdiri terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling membingkai dan bersinergi.

4. Kenapa Harus Benar dan Jujur?

Konsep keterbukaan (*all-inclusive*) yang dalam konsep keilmuan ekonomi-akuntansi syariah memberikan pemahaman, bahwa konsep keilmuan ekonomi-akuntansi syariah diletakkan dalam proporsi yang seimbang dengan tetap mengedepankan nilai etika keterbukaan dan kejujuran. Nilai etika Islam sebagai ruh dari operasional ekonomi-akuntansi syariah menghantarkan pada pemahaman, bahwa praktik ekonomi-akuntansi syariah dilandasi tiga pilar utama yaitu: pertanggungjawaban (*accountability*), keadilan (*justice*), dan kebenaran (kejujuran) (QS. 2, 282).

Konsep keadilan dan kebenaran (kejujuran) merupakan dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, keadilan yang ingin dibangun membutuhkan satu konsep pembukuan yang mengedepankan nilai kebenaran dan kejujuran. Demikian halnya, terwujudnya pembukuan yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran (kejujuran) memberikan implikasi pada terwujudnya tatanan pembukuan perbankan syariah yang berkeadilan.

Dua kekuatan sebagaimana di atas, merupakan satu kekuatan yang dimiliki dalam kaidah ekonomi syariah (di dalamnya akuntansi) dengan pendekatan manajemen “amanah”. Manusia diturunkan kebumi sebagai *khalifatu lilLah* memiliki dimensi pemahaman yang sangat mendasar yaitu: bagaimana terciptanya satu tatanan masyarakat berkeadilan yang landasi dengan konsep keterbukaan dan kebenaran menurut kaidah syariah.

Konsep keilmuan ekonomi-akuntansi yang mengedepankan nilai keterbukaan dan kebenaran dalam praktik memiliki arti bahwa; keilmuan ekonomi-akuntansi syariah akan melakukan dan atau mencatat secara benar (jujur) apa yang terjadi baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

5. Simpulan

Ilmu *positivism* yang memiliki kriteria eksplanatoris dan prediktif telah menghantarkan pada satu tataran pandangan dunia sebagai keilmuan yang bersifat objektif, fenomenalisme, reduksionis, dan naturalisme. Tidak ketinggalan halnya pada keilmuan ekonomi-akuntansi yang notabene keilmuan sosial juga mengikuti arus yang sangat kuat pada akhir abad 19-an. Walaupun pada kenyataannya seiring dengan perkembangan keilmuan masyarakat keberadaan keilmuan ekonomi-akuntansi semacam ini mendapat kritik yang sangat tajam.

Aktivitas ekonomi-akuntansi yang melibatkan interaksi sosial masyarakat, menjadi satu pertanyaan yang tajam “apakah ilmu positivisme yang bebas nilai itu sejalan dengan sifat-sifat manusia sebagai pelaku interaksi”? Dengan sangat gamblang misalnya Chua (1986) memberikan pemahaman bahwa akuntansi adalah sebagai hasil anak budaya dan atau bahkan mampu membentuk budaya masyarakat (lihat juga Triyuwono 2000, Karim dan Gambling 1991).

Nilai materi yang dijadikan sandaran sebagai ontologi dalam pembentukan keilmuan ekonomi-akuntansi, maka menghantarkan nilai *utilitarianisms* sebagai rel etikanya. Dampak yang muncul berikutnya adalah eksploitasi, penindasan, dan pembantaian akan sering terjadi dan menjadi pembenar sebagai konsekuensi dari pemahaman *utilitarianisms*. Islam sebagai *rahmatat lil 'alamin*, mendorong seorang Kuntowijoyo melakukan perubahan orientasi keilmuan dengan pendekatan transformasi keilmuan sosial Islam yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam dan peradaban zaman.

Untuk melakukan transformasi keilmuan sosial Islam, Kuntowijoyo (1998) berangkat dari pemahaman QS. Ali Imran ayat 110 yang disimbolkan dalam filosofi “ilmu sosial profetik”. Kerangka keilmuan sosial dalam Islam berdasarkan ide inspirasi *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam konteks *amar ma'ruf* ada di dalamnya dimensi humanis dan *emansipatoris* yaitu proses untuk memanusiakan manusia dan menata lingkungan maupun struktur sosial menjadi lebih baik. Nahi munkar, terdapat dimensi pembebasan yang berdasarkan pada prinsip pembebasan dari ketertindasan sebagai akibat struktur keilmuan yang ada (Pribadi dan Haryono 2002, 338; baca juga Kuntowijoyo 1998; Triyuwono 1997, 2001).

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. 2002. Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan; Dari David Hume sampai Thomas Kuhn. Jakarta. Penerbit Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan
- Adnan, Muhammad Ahyar. 2002. Pengembangan Nilai-Nilai Islam dalam Kajian Ilmu Ekonomi, Millah, Vol. II. No. 2. pp. 1-8.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Chua, Fai Fong, 1986, Radical Developments in Accounting Thought, The Accounting Review, Vol. LXI. No. 4, Oktober. pp. 601 – 632.
- Gambling, Trevor, and R.A. Abdul Karim, 1991, Business and Accounting Ethics in Islam, London. Mansell Publishing Ltd.
- Giddens, Anthony, 2001, Tumbal Modernitas: Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan, Penerjemah Mohammad Yamin, Yogyakarta, Penerbit IRCISOD.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2003a. Menilai Perkembangan Penerapan Akuntansi Syari'ah. Jakarta. Media Akuntansi, Edisi; 33 / Mei, pp. 48-60.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2003b. Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol. 3, No. 1. pp 56-75
- Heriyanto, Husain, 2003, Paradigma Holistik; Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead, Jakarta, Penerbit Teraju.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael Dua, 2001, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Keraf, A. Sonny, 1996, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Khadduri, Majid, 1999. Teologi Keadilan Perspektif Islam, Alih bahasa H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, Surabaya, Penerbit Risalah Gusti.
- Kuntowijoyo, 1998, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Bandung, Penerbit Mizan.
- Kutowijoyo, 2004, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Penerbit Teraju.
- Lari, Sayid Mujtaba Musawi, 2001, Etika dan Pertumbuhan Spiritual, Jakarta, Penerbit, PT. Lentera Basritama.
- Manan, Muhammad Abdul, 1992, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, alih bahasa Potan arif Harahap, Penerbit PT. Intermasa.
- Muhammad, 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an, Yogyakarta, Penerbit Universitas Islam Indonesia Press.

- Nasution, Khoiruddin. 2002. Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam. Millah, Vol. II. No. 2. pp. 9-25.
- Pribadi, Airlangga dan M. Yudhie R Haryono, 2002, Post Islam Liberal: Membangun Dentum, Mentradisikan Eksperimentasi, Penerbit Gugus Press.
- Rasyid, Eddy R., 1997, Mengakarkan Akuntansi Pada Bumi Sosial-Kultural Indonesia: Perlunya Perspektif Alternatif, Media Akuntansi, No.23/Th. IV Nopember-Desember, pp. 13-21.
- Rasyid, Eddy R., 2001, (RE) Kontruksi Setting Riset untuk Suatu Studi Etnografi Praktik Akuntansi di Sebuah Perusahaan Swasta Nasional, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 5, No. 1, Juni, pp. 17-37.
- Sahal, Ahmad, 1994, Kemudian di Manakah Emansipasi? Tentang Teori Kritis, Geneologi, dan Dekonstruksi, Kalam Jurnal Kebudayaan, Jakarta, Edisi: 1, pp. 12-22.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi, 1997, Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi dalam Riset Akuntansi, Media Akuntansi, Edisi No. 21/Th. IV. pp. XI-XX
- Sawarjuwono, Tjiptohadi, 2002, Metodologi Penelitian Akuntansi, Manajemen dan Bisnis; Pendekatan
- Kritis-Critical Paradigm (Habermasian). Kertas Kerja Kuliah Tamu, Program Magister Sains-Akuntansi Fakultas Ekonomi Brawijaya, 1 Juni.
- Setiabudi, Hendry Y., Iwan Triyuwono, 2002, Akuntansi Ekuitas: dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam, Jakarta, Salemba Empat.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1996, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, alih bahasa Anas Sidik, Penerbit Bumi Aksara.
- Smith, Huston, 2003, Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains?, Penerjemah Ary Budiyanto, Bandung. Penerbit Mizan.
- Sulaiman, Abdul Hamid A.,1997., Krisis Ilmu Pengetahuan, Salam, PPS UMM, Edisi; 2 dan 3. Th. II, Desember 1997- Juni 1998, pp. 1-21.
- Syahatah, Husein, 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, Penerjemah Husnul Fatarib, Lc., Jakarta, Penerbit Akbar Media Eka Sarana.
- Triyuwono, Iwan, 1996, Teori Akuntansi Berhadapan Nilai-Nilai Ke-Islaman, Ulumul Qur'an, Edisi No. 5, Vol. VI, pp. 44-61.
- Triyuwono, Iwan, 1997, Akuntansi Syari'ah dan Koperasi: Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, UII Yogyakarta, Vol. 1 No. 1 Mei. pp: 3-45
- Triyuwono, Iwan, 2000a, Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian, Kertas Kerja Short Course Metodologi Penelitian Paradigma Alternatif, CBIES Faculty of Economics – Brawijaya University, 8 – 9 Mei.

- Triyuwono, Iwan, 2000b, Organisasi dan Akuntansi Syari'ah, Yogyakarta, Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Triyuwono, Iwan, 2000c Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah, Kertas Kerja Seminar Akuntansi Syari'ah dan Accounting Fair 2000, HMJ-Akuntansi FE. UNIBRAW. 5 Oktober.
- Triyuwono, Iwan, 2002a. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta. Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami I. P3EI-FE UII. 13-14 Maret. pp. 203-216.
- Triyuwono, Iwan, 2002b, Prinsip Dasar Teori Akuntansi Syari'ah, Kerta Kerja Seminar Shari'ah Accounting Event 2002, KiAMI, FSI-SM-FEUI, 29 Oktober.
- Turner, Bryan S., 2003, Agama dan Teori Sosial: Rangka-Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer, (Penerjemah Inyiah Ridwan Muzir) Yogyakarta, Penerbit IRCiSoD.
- Walters, J. Donald, 2003, Crises in Modern Thought; Menyelami Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Lingkup Filsafat dan Hukum Kodrat, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama